

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Permulaan 2020 menjadi awal tahun yang menggemparkan dunia dengan muncul virus baru yang membahayakan nyawa manusia. Bencana kemanusiaan yang saat ini terjadi memang sangat menggemparkan dunia, dan membuat panik seluruh manusia. Bencana yang terjadi yaitu yang disebabkan oleh salah satu virus berjenis baru COVID-19 (Corona) yang sampai saat ini belum ditemukan vaksin nya. Penyebaran virus ini sangat cepat pada awalnya penyebaran virus ini diturunkan dari hewan kewanusiaan dan saat ini manusia kewanusiaan.

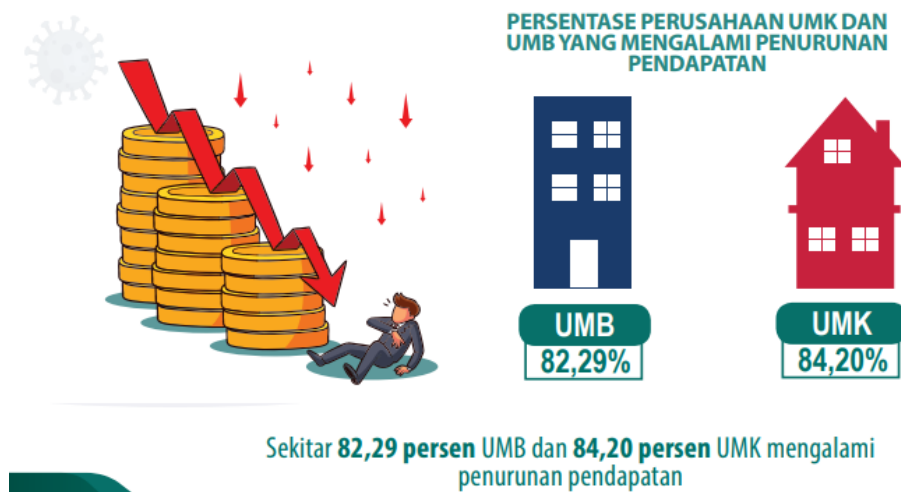
Di Indonesia sendiri Pandemi covid-19 menimbulkan dampak yang signifikan baik itu dalam segi sosial dan ekonomi, hampir seluruh elemen masyarakat kewalahan akibat adanya pandemi covid 19 ini, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi dampak pandemi ini. Awal mulai pandemi ini pemerintah memberlakukan PSBB disetiap wilayah yang berakibat menurunnya pendapatan ekonomi, banyak masyarakat yang di PHK oleh perusahaan nya, serta banyak perusahaan yang gulung tikar akibat pandemi ini karena kegiatannya dibatasi dan diharuskan berdiam di rumah.

Sampai saat ini dampak pandemi ini belum juga usai, masih banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan usahanya, salah satu dampak yang dirasakan yaitu banyak UMKM yang terkena dampak, dan tidak bisa bertahan dengan kondisi pandemi ini karena kegiatan masyarakat masih dibatasi dengan berlakunya jam malam dan

sekolah yang masih belum normal kembali. Berikut ini adalah data mengenai UMK(UMKM) yang mengalami dampak penurunan Omzet berdasarkan Data yang diperoleh dari BPS tahun 2020 :

Gambar 1

Persentase Penurunan Pendapatan UMK Karena Covid 19 Tahun 2020



Sumber : Badan Pusat Statistik tahun 2020

Dari data di atas bisa dilihat bahwa sebanyak 84,20% pelaku UKM/UMKM yang mengalami dampak penurunan pendapatan/omzet di Indonesia ini dikarenakan adanya pembatasan *social PSBB* dan para pelanggannya pun ikut terdampak sehingga mengurangi daya beli masyarakat.

UKM di Indonesia memberikan kontribusi penting dalam mendukung perekonomian. Penggerak utama perekonomian Indonesia masih sektor UMKM. Selain perannya dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan penyerapan tenaga kerja, UKM berperan dalam mendistribusikan hasil pembangunan dan menjadi motor

penggerak pertumbuhan kegiatan ekonomi nasional. Perhatian terhadap pengembangan sektor UKM sangat penting bagi upaya negara untuk mengurangi kemiskinan. Karena merupakan motor penggerak maka pemerintah melakukan beberapa upaya untuk memulihkan Kembali para pelaku UKMK/UKM.

Pemerintah pusat khususnya presiden telah mengeluarkan kebijakan untuk memberi bantuan kepada pelaku UMKM, sebagai upaya untuk meningkatkan kembali perekonomian di masyarakat, karena UMKM bisa cepat tumbuh kembali dengan tempo waktu yang cepat. Kebijakan ini ditindaklanjuti dengan keluarnya Peraturan Menteri Koperasi dan Menengah (MENKOPUKM) Nomor 6 tahun 2020 tentang BPUM (Bantuan Produktif Usaha Mikro). Bantuan ini disalurkan langsung kepada masyarakat yang UMKM nya terkena dampak, bantuan ini diberikan kepada masyarakat sebesar Rp. 2.400.000 yang di salurkan melalui bank penyalur. UMKM yang berhak menerima bantuan ini adalah yang memang memenuhi persyaratan yang telah di tentukan dan memiliki surat keterangan usaha atau NIB (Nomor Ijin Berusaha).

Masyarakat khususnya di kota Bandung menyambut dengan baik program ini, masyarakat pun sangat antusias karena akan diberikan bantuan untuk menyelamatkan usahanya. Karena program ini dari pusat dan langsung disalurkan oleh bank penyalur yang sudah ditentukan membuat kewalahan pemerintah daerah terutama Dinas UMKM karena banyak masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan tersebut.

Diharapkan dengan adanya bantuan BPUM ini masyarakat sebagai pelaku usaha UMKM ini dapat meningkatkan produktifitas usaha yang terdampak *pandemic* menjadi hidup dan tumbuh kembali. Karena memang UMKM bisa dengan cepat tumbuh

kembali dikarenakan perputaran uangnya yang sangat cepat, namun jika tidak dikelola dengan baik juga UMKM ini cepat mati pula. Selain bantuan BPUM banyak program lain yang ditujukan untuk para pelaku usaha UMKM dengan dipermudahnya Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga yang cukup rendah, program KUR ini banyak dikeluarkan oleh bank sebagai upaya untuk menumbuhkan kembali perekonomian masyarakat yang stabil.

Awalnya bantuan tersebut sudah disosialisasikan melalui dunia maya atau sosial media, namun karena kurang koordinasi antara pusat dan daerah, hal ini menimbulkan permasalahan baru di Kota Bandung sendiri, masyarakat langsung menyerbu Dinas UMKM dan bertanya tentang bagaimana cara mendapatkan bantuan tersebut, Sedangkan Dinas UMKM Kota Bandung belum membuat SOP tersendiri mengenai mekanisme untuk mendapatkan bantuan BPUM ini sehingga mengakibatkan membeludaknya para pendaftar calon penerima BPUM. Berikut ini adalah data pendaftar BPUM tahun 2020 di Kota Bandung:

Pendaftar BPUM Kota Bandung Tahun 2020

No	UMKM Pendafatar BPUM	Jumlah
1	Pendaftar BPUM	150.000
2	Lolos seleksi	56.000
3	Tidak Lolos Seleksi	94.000

Sumber : DINAS UMKM Kota Bandung tahun 2020

Adapun dilihat dari table di atas kuota yang dikeluarkan pemerintah melalui Dinas Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung sebanyak 56 ribu pelaku usaha UMKM yang disiapkan untuk mendapatkan Banpres (BPUM), akan tetapi jumlah yang mendaftar untuk menerima bantuan ini adalah sebanyak 150 rb itu membuktikan masyarakat di Kota Bandung sangat antusias dengan program ini, namun 150 ribu pendaftar ini diantaranya bukan yang memang pelaku usaha UMKM asli, banyak masyarakat yang asal atau tiba-tiba membuat surat keterangan usaha namun nyatanya mereka tidak membuka usaha UMKM.

Dinas UMKM Kota Bandung hanya diberi wewenang untuk mengumpulkan berkas yang telah terkumpul dari 30 kecamatan di Kota Bandung, hal ini tentunya membuat kewalahan para petugas di lapangan yang membidangi para pelaku UMKM. Namun kebijakan BPUM dipandang kurang tepat sasaran, selain itu pengawalan dari pemerintah daerahnya pun kurang karena urusan tersebut langsung diambil alih oleh kementerian pusat, sehingga pemerintah daerah khususnya Dinas UMKM Kota Bandung cukup kewalahan dengan melonjaknya masyarakat yang meminta fasilitas bantuan BPUM, maka dari itu kebijakan ini harus dievaluasi.

Banyak persoalan atau permasalahan yang timbul akibat adanya kebijakan bantuan ini salah satunya adalah tidak tepat sasaran, banyak sekali para pelaku usaha UMKM yang lama tidak menerima bantuan BPUM ini sedangkan para oknum yang tidak melakukan usaha UMKM ini banyak yang lolos dan menerima bantuan BPUM. Contoh ada sebagian orang yang memanfaatkan kelemahan ini dengan meminta SKU (Surat Keterangan Usaha) namun sebenarnya tidak memiliki usaha. Permasalahan lainnya

adalah Dinas UMKM Kota Bandung sendiri tidak diberi wewenang untuk memvalidasi data yang di daftarkan oleh masyarakat ke Dinas UMKM.

Melihat penggambaran masalah di atas, maka perlu dilakukan penelitian mendalam tentang kebijakan BPUM sebagai tahapan untuk membangun kembali perekonomian di Indonesia, khususnya di kota Bandung. Oleh karena itu penulis mengangkat judul : **“Evaluasi kebijakan Bantuan Produktif Usaha Mikro di Dinas KUKM Kota Bandung Tahun 2020”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Evaluasi Kebijakan BPUM di DINAS KUKM Kota Bandung tahun 2020.?
2. Apa yang menyebabkan Penyaluran BPUM di Kota Bandung tidak tepat sasaran?
3. Apa hal positif dan negatif dari adanya BPUM di Dinas KUKM Kota Bandung?

1.3 Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui kinerja kebijakan BPUM di Masyarakat Kota Bandung
2. Untuk mengevaluasi kebijakan BPUM di DINAS KUKM Kota Bandung
3. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan kebijakan BPUM di Kota Bandung

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat menimbulkan spekulasi dan gagasan dalam tatanan rumusan kebijakan, khususnya kajian tentang kebijakan publik yang diidentikkan dengan evaluasi kebijakan.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat seperti halnya sebagai bahan penambah daya fikir kritis terhadap evaluasi kebijakan.

1.5 Kerangka Pemikiran

Pandemic Covid sangat berdampak besar terhadap perekonomian masyarakat baik itu skala makro dan mikro, berbagai upaya pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk menumbuhkan kembali perekonomian masyarakat salah satunya adalah program BPUM yang diberikan langsung oleh kementerian koperasi kepada para pelaku usaha kelas mikro.

Proses untuk mendapatkan BPUM adalah sebagai berikut: bantuan usaha diperuntukan untuk para pelaku usaha yang terdampak covid 19, lalu para pelaku usaha membuat SKU (surat keterangan usaha) yang dikeluarkan oleh kelurahan dengan pengantar RT dan RW. Setelah itu para pelaku usaha UMKM melakukan pendaftaran ke Dinas KUKM dengan melampirkan KTP, SKU dan Foto-foto Usaha yang mereka jalani. Namun pada kenyataan banyak masyarakat yang mengaku ngaku mempunyai usaha memanfaatkan kesempatan untuk membuat SKU di Kelurahan dan tidak ada pengawasan terhadap mereka. sehingga pada tujuan awalnya saja tidak tercapai karena banyak data yang diakali oleh penerima yang bukan haknya.

Kebijakan tersebut dipandang tidak tepat sasaran, dan dalam prosesnya pun banyak target yang tidak tercapai karena tidak tepat sasaran, selain itu pengawalan dari pemerintah daerahnya pun kurang karena urusan tersebut langsung diambil alih oleh kementerian pusat, sehingga pemerintah daerah khususnya Dinas KUKM Kota Bandung cukup kewalahan dengan melonjaknya masyarakat yang meminta bantuan BPUM, maka dari itu kebijakan ini harus dievaluasi salah satunya dengan teori yang dikemukakan oleh Palumbo.

Di tuturkan oleh Palumbo yang termuat didalam buku Sahya Anggara 2017, komponen evaluasi kebijakan dalam kajian kajian mencakup seluruh siklus dalam interaksi pengaturan, mulai dari perencanaan strategi perencanaan, pelaksanaan, hingga pemenuhannya. Jika teridentifikasi dengan kebutuhan data yang diperoleh dari hasil penilaian, maka komponen penilaian strategi meliputi pengaturan rencana, definisi masalah, antisipasi (definisi obyektif.), estimasi karakterisasi, penyebaran masalah, pemeriksaan pilihan, rencana strategi, investigasi masuk akal politik, akhir, penyatuan dan tinjauan, keaslian strategi, penilaian perkembangan, penilaian sumatif, efek, dan eksekusi.

a. Evaluasi prose pembuatan kebijakan,

Pembuatan strategi atau sebelum pengaturan dilakukan. Seperti yang ditunjukkan oleh Palumbo, pada tahap ini dibutuhkan dua penilaian.

b. Evaluasi rencana strategi,

Untuk mensurvei pilihan yang dipilih, sekarang adalah pilihan yang paling cerdas dengan memperkirakan hubungan antara biaya dan keuntungan (pemeriksaan keuntungan menghemat uang), yang berkepala dingin dan dapat diukur.

c. Evaluasi keaslian strategi,

Untuk mengevaluasi tingkat pengakuan suatu pendekatan atau program oleh daerah / mitra / kelompok sasaran lokal yang cenderung oleh strategi. Teknik penilaian diperoleh melalui survei, studi, dan lain-lain. Dalam istilah administrasi, penilaian pembangunan mengamati pemanfaatan pengaturan.

d. Evaluasi sumatif,

Dilakukan ketika strategi telah dijalankan dan memiliki efek. Tujuan dari penilaian kumatif adalah untuk mengukur kelangsungan hidup dari strategi / program yang memberikan efek yang dijaga.

Gambar 2
Alur Berfikir Peneliti

